



Media: Harian Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 15 Mei 2026

Halaman: 4

PSEL di DIY Mundur, Jangan Ulangi Krisis Sampah

TAJUK

Pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di DIY dipastikan mundur hingga 2028 akibat kegagalan negosiasi tender tahap pertama. Kepastian pasokan sampah minimal 1.000 ton per hari dan ketersediaan lahan juga menjadi penghambat. Sementara itu, sistem *open dumping* di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, andalan tiga daerah aglomerasi Kartamantul (Kota Jogja, Sleman, dan Bantul), akan diakhiri Desember 2026.

Pemkot Jogja mengklaim depo-depo masih terkendali berkat pemilahan sejak rumah tangga melalui Gerakan Masyarakat Jogja

Olah Sampah (Mas JOS). Tetapi ketergantungan regional pada Piyungan yang sudah melebihi umur teknis masih sangat tinggi.

Perlu diketahui, penutupan *open dumping* bukan sekadar tenggat administratif, melainkan keharusan lingkungan yang mendesak. Di tengah penundaan PSEL, *Intermediate Treatment Facility* (ITF) Bawuran di Pleret, Bantul, menjadi salah satu harapan sementara. Fasilitas ini diproyeksi mampu mengolah 50-70 ton sampah residu per hari dengan *output* antara lain *paving block*. ITF Bawuran diharapkan menjadi bagian kolaborasi kawasan aglomerasi untuk mengurangi beban

Piyungan. Meski kapasitasnya masih terbatas dibandingkan total timbulan sampah dari Kartamantul, keberadaannya merupakan langkah konkret pengelolaan mandiri yang patut diperluas.

Penundaan PSEL menciptakan celah hampir dua tahun yang berisiko. Tanpa persiapan matang, potensi penumpukan sampah, pembakaran liar, dan pencemaran akan melonjak. Kampanye dan edukasi pemilahan sampah harus jauh lebih gencar. Pemilahan di hulu adalah kunci utama. Program distribusi ember pemilahan organik-anorganik perlu diperluas ke Sleman dan Bantul dengan target reduksi

terukur. Perlu pula insentif bagi wilayah sukses, serta sanksi tegas bagi yang belum memilah. Setiap ton sampah yang dipilah dan diolah meringankan beban sistem hilir secara signifikan.

Rencana cadangan penutupan TPST Piyungan harus jelas dan transparan. Pemda DIY wajib memastikan kawasan Kartamantul telah menjalankan peta jalan pengelolaan sampah mandiri. Optimalisasi ITF Bawuran, pengembangan TPS3R di berbagai titik, fasilitas skala komunitas, dan kerja sama antardaerah harus dirinci detail beserta alokasi anggaran bersama.

Jangan lagi mengulangi pola

lama: menunggu pintu Piyungan tertutup baru panik mencari solusi darurat yang mahal dan tidak berkelanjutan. Kolaborasi Kartamantul harus diwujudkan nyata, bukan sekadar wacana.

Penutupan TPST Piyungan pada akhir 2026 adalah *wake-up call* yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah daerah harus bertindak proaktif, terukur, dan kolaboratif.

Jika gagal mempersiapkan antisipasi yang jelas, DIY akan kembali diterpa krisis sampah yang jauh lebih mahal dari segi lingkungan, ekonomi, dan kesehatan publik. Saatnya bergerak tegas sebelum terlambat.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005